

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh. 2009. *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Andi pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindi, Depok.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, Edisi Kedua, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta.
- _____. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cambel. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora, Erlangga, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dadang Suwanda. 2014. *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Diemas Adjie Nugroho. 2020. *Otonomi Daerah*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, Jakarta.
- Efendi Fadli. 2022. *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Guepedia, Jakarta.
- E. Perangin. 1994. *401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Febriana, E. N. 2017. *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Lentera Hukum, Jakarta.

- Gunawan Widjaja 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handayani Debie. 2013. *Manajemen Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tanjung Pinang*, Naskah Publikasi, Tanjung Pinang.
- Hans Kelsen. 2007. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung.
- Hartanto, J. A. 2015. *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Haw Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 19
- Hendra Kariangan. 2013. *Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta.
- . 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah, Perspektif Hukum dan Politik*. Kencana, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanto & M. Gunawan 2008. *Kewenangan Pemerintah Bidang Petanahan*, Rajawali Pers. Jakarta.
- I.G.N. Santika. 2021. *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*, Lakeisha, Yogyakarta.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Ismaya S. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ismira. 2017. *Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, program Hukum Pidana dan Ketatanegaran*, UIN Alauddin, Makassar.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, G. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.

- M. Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung.
- _____. 2004. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, pilihan atas federasi atau negara kesatuan*, UII Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo. 2015. *Hukum Administrassi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soeroso. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, Gramedia, Bandung.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriyadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Sutedi. 2020. *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaukani HR et. all. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan PUSKAP, Yogyakarta.
- Ubedilah. 2000. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Indonesia Center for Civic Education, Jakarta.
- Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya*. Pustaka Setia, Bandung.
- U. Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

- Abdul Raufalauddin Said, Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 Universitas Lampung, 2015, hlm. 583
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, 2000, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 2
- Fadli, Abu Rizal dan Mochamad Samsukadi, Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali, *Jurnal AL-YASINI Volume 04*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Yasini, Pasuruan, 2019, hlm. 124
- Karmila, Cokorda Dalem Dahana, Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial. *Jurnal KerthaNegara*, Vol. 06, No. 01, Fakultas Hukum Universitas Udatana, Bali, 2017, hlm. 217.
- Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2014, hlm. 27
- Prastowo Budi, Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, April 2017, hlm 1
- R. Sopiyaniti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Peer To Peer Lending (P2p Lending) Berbasis Teknologi Informasi, *Repository Unsil*, Jawa Barat, 2022, hlm. 12.
- Sularso, H & Restianto, Y.E. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Aloaksi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*. Vol. 1. No. 2, 2011, hlm. 109-124.
- S. Sauni, Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan, *Jurnal UBELAJ*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2016, hlm 45–67.
- Yuvita, Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2020, hlm. 63

MAKALAH

Aulia Utami Putri, *Pengelolaan Pemberian Dana Hibah*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016, hlm. 19

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 61.

Eko Winarno, *Pengaturan Hak Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm. 13

Febert Ricardo Pinontoan. Tesis: Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaritas Yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2021, hlm. 45.

Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan, Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 1

Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Kantor Hukum WINS & Partners bekerjasama dengan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, 2013, hlm. 109.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.